



JURNAL KONSTITUSI

Volume 9 Nomor 4, Desember 2012

- ◉ Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Regulasi *Production Sharing Contract*
Cut Asmaul Husna TR
- ◉ Pergeseran Kekuasaan Tipologi Ketiga; Fenomena Kekuasaan Ke Arah *Constitutional Heavy*
Puguh Windrawan
- ◉ Penyusunan Program Legislasi Daerah yang Partisipatif
Sunarno Danusastro
- ◉ Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945
Achmad Edi Subiyanto
- ◉ Instrumentasi Hukum HAM, Pembentukan Lembaga Perlindungan HAM di Indonesia dan Peran Mahkamah Konstitusi
M. Syafi'ie
- ◉ Kompatibilitas Metode Pembuktian dan Penafsiran Hakim Konstitusi dalam Putusan Pemilukada
Helmi Kasim, Syukri Asy'ari, Meyrinda R. Hilipito, Rio Tri Juli Putranto
- ◉ Inkonsistensi Paradigma Otonomi Daerah di Indonesia: Dilema Sentralisasi atau Desentralisasi
Wasisto Raharjo Jati
- ◉ Pemberhentian Antar Waktu Anggota KPU (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 80/PUU-IX/2011)
R. Nazriyah

JK	Vol. 9	Nomor 4	Halaman 597- 794	Jakarta Desember 2012	ISSN 1829-7706
----	--------	---------	---------------------	--------------------------	-------------------

Terakreditasi Nomor: 412/AU/P2MI-LIPI/04/2012

**KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Penyusunan Program Legislasi Daerah yang Partisipatif

Sunarno Danusastro

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Jl. Ir. Sutami No.36 A, Kentingan surakarta.
Email: sunarno_danusastro@yahoo.co.id

Naskah diterima: 31/10/2012 revisi: 5/11/2012 disetujui: 12/11/2012

Abstrak

Penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai penyusunan Program Legislasi Daerah yang partisipatif. Selain itu juga untuk mengetahui peran Pemerintah Daerah dalam penyusunan Program Legislasi Daerah yang partisipatif

Penelitian ini merupakan penelitian hukum nondoktrinal atau empiris yang bersifat eksploratif. Lokasi penelitian di Surakarta. Jenis data yang dipergunakan meliputi data primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara Bagian Rapat dan Peraturan Perundangan DPRD Kota Surakarta, Bagian Hukum dan HAM Pemerintah Kota Surakarta, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Partai Politik yang berkaitan dengan penyusunan Program Legislasi daerah yang partisipatif di Surakarta. Sumber data sekunder diperoleh dari bahan-bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan yaitu meliputi wawancara dan studi kepustakaan baik berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, dan sebagainya. Analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan model interaktif yaitu dimulai dari pengumpulan data, kemudian mereduksi data yang digunakan, setelah itu menyajikan data, dan terakhir adalah penarikan kesimpulan.

Untuk menyusun deskripsi dan pemahaman permasalahan digunakan teori pemerintahan daerah, teori legislasi daerah, teori Demokrasi. Dari pembahasan hasil penelitian dihasilkan simpulan sebagai berikut: Demokrasi merupakan bagian dari negara hukum Indonesia yang ditandai salah satunya dengan